**BAB VI**

**PEMBAHASAN**

Takeshima yang memiliki arti pulau bambu ( Jepang ), Dokdo yang memiliki pulau yang sepi ( Korea Selatan ), atau beberapa negara lain disebut juga pulau Liancourt Rocks[[1]](#footnote-2). Sebelum bernama Dokdo pihak Korea Selatan memiliki beberapa nama untuk kepulauan Dokdo yaitu Unsando, Sambongdo, Seokdo, dan Gajido dimana arti dari nama – nama tersebut adalah tidak adanya penduduk yang mendiami pulau tersebut, Unsando menjadi nama pertama dalam teks resmi pada dinasti Shilla 512 SM [[2]](#footnote-3).

Kepulauan Takeshima ( Dokdo ) memiliki luas sekitar 187,450m² dengan titik tertinggi 169 meter, pulau Takeshima ( Dokdo ) terdiri dari dua pulau kecil yang terpisah dengan jarak 150 meter yang bernama Seodo dan Dongdo ( Korea Selatan ), Nishi-jima dan Higashi-jima ( Jepang ) dan satu pulau besar dan 90 pulau kecil. Pulau Takeshima ( Dokdo ) terletak di sekitar 131,52 Bujur Timur dan sekitar 37,14 Lintang Utara, jarak pulau Takeshima ( Dokdo ) dengan negara Jepang jika diukur dari daratan Jepang berjarak 250km apa bila diukur dari kepulauan Oki berjarak sekitar 157,5km sedangkan apabila diukur dari daratan Korea Selatan berjarak 216,8km apabila diukur dari kepulauan Ulleung-do berjarak 87,4km.

Kepulauan Tskeshima ( Dokdo ) memiliki beragam ekosistem hal ini di karenakan oleh iklim dan geografis kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang cenderung hangat serta letak kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang terletak di Laut Jepang menjadikan kepulauan tersebut memiliki tempat yang startegis bagi kehidupan biota laut dan persinggahan berbagai jenis burung, banyaknya plankton yang menyebabkan banyak kehidupan biota laut di kepulauan Takeshima ( Dokdo ) diantaranya berupa ikan, udang, dan kerang.

Pada tahun 2007 pemerintah Jepang dan Korea Selatan mengumumkan penemuan sejumlah besar deposit gas hidrat di wilayah sekitar kepulauan Takeshima ( Dokdo ) tepatnya di Ulleung Tsushima Basin. Gas hidrat sendiri adalah sebuah kristal padat yang tersusun dari gas metana dan molekul air, gas hidrat memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi di bandingkan dengan jenis gas alam lainnya yang dapat di manfaatkan sebagai sumber energi,pada umumnya gas hidrat ditemukan jauh di dasar laut. Sampai saat ini ekstraksi dari gas hidrat tersebut belum dilakukan karena membutuhkan biaya besar dan teknologi yang memadai untuk dapat mengambil gas tersebut, jumlah gas hidrat yang terkandung di Ulleung Tsushima Basin diperkirakan sebanyak 600 juta ton, jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan energi selama tiga puluh tahun[[3]](#footnote-4).

1. **Klaim Korea Selatan Terhadap Pulau Dokdo**

Korea Selatan memiliki dasar klaim kepemilikan pulau Dokdo dengan adanya fakta sejarah yang ada, Korea Selatan mengkalim bahwa pulau Dokdo berada dibawah kedaulatannya berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Ussanguk ( pulau yang tidak berpenghuni ) yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 ( 512 SM ) yang menunjukan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal sejak masa dinasti Silla[[4]](#footnote-5). Para sejarawan Korea Selatan juga sependapat dengan acuan historis yang diberikan oleh pemerintah, sejarawan mengatakan bahwa Dokdo berada di bawah kontrol efektif Korea Selatan sejak 512 SM dan tercatat dalam *The Annals of The Kingdom of Shilla* yang tertulis bahwa pada saat kekuasan dinasti Silla telah menaklukkan Ulleungdo dan Dokdo[[5]](#footnote-6).

Selain adanya klaim berdasarkan fakta sejarah Korea Selatan juga mengkalim pulau Dokdo berdasarkan georgrafis letak pulau Dokdo apabila diukur jarak dari pulau Ulleungdo hanya berjarak 87,4km sehingga pulau Dokdo Dapat di lihat dengan jelas dari pulau Ulleungdo. Apabila diukur jarak dari pulau Oki berjarak 157,5km dan pulau Dokdo tidak dapat terlihat dari pulau Oki[[6]](#footnote-7). Pada tahun 1952 pemerintah Korea Selatan mengeluarkan deklarasi Presiden Korea Selatan dimana deklarasi tersebut menciptakan garis imajiner bernama Rhee Line yang membatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang, garis tersebut juga memberi konsekuensi bahwa sebagian besar wilayah Laut Jepang termasuk pulau Dokdo berada dibawah kedaulatan Korea Selatan[[7]](#footnote-8).

1. **Klaim Jepang Terhadap Pulau Takeshima**

Dasar klaim yang di berikan oleh Korea Selatan mendapat bantahan dari pihak Jepang, Jepang memiliki klaim terhadap pulau Takeshima mengacu pada perjanjian San Francisco 1951 Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

“ *Japan Recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including teh island of Quelpart, Port Hamilton, and Deglet.”*

( Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet )[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan isi Pasal 2 Perjanjian San Francisco, Jepang berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan Korea sedangkan kewajiban untuk mengembalikan pulau Takeshima ( Dokdo ) tidak di sebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadi suatu keyakikan pihak Jepang bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) merupakan wilayah teritorialnya. Selain dengan adanya perjanjian San Francisco pihak Jepang juga mengkalim pulau Takeshima ( Dokdo ) pada September 1904 Nakai Yozaburo seorang nelayan asal kepulauan Oki mengajukan permohonan untuk memasukkan kepaulauan Takeshima ( Dokdo ) sebagai wilayah Jepang dalam permohonan tersebut Nakai menyebutkan bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan status teritorialnya tidak jelas sehingga Nakai meminta Jepang mengambil kepastian status teritorial pulau Takeshima tersebut agar mengamankan sumber daya ekonomi yang ada di pulau Takeshima ( Dokdo )[[9]](#footnote-10). Sehingga Jepang mengokupasi pulau Takeshima ( Dokdo ) dan menetapkan tanggal 22 Februari 1905 resmi memasukkan pulau Takeshima ( Dokdo ) sebagai bagian dari wilayah Jepang dan berada dalam Perfektur Shimane dan menetapkan pada tanggal tersebut sebagai *Takeshima Day.*

Klaim Jepang lainnya atas pulau Takeshima ( Dokdo ) adalah adanya perjanjian aneksasi Jepang atas Semenanjung Korea pada tahun 1910 dan secara otomatis wilayah Semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang, namun ada satu hal yang dianggap oleh pihak Jepang penting untuk mengeklaim pulau Takeshima ( Dokdo ) bahwa pulau tersebut tidak termasuk kedalam wilayah Semenanjung Korea sehingga Jepang menganggap bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) adalah wilayah yang tidak ada pemiliknya[[10]](#footnote-11).

1. **Eskalasi Konflik Kedua Negara Atas Klaim Pulau Takeshima ( Dokdo )**

Dalam publikasi pada era pemerintahan Joseon yaitu *Sejong Sillok Jirji* ( bagian geografi dari pemerintahan raja Sejong ) tahun 1454 mencatat bahwa Ulleungdo dan Dokdo adalah dua pulau yang merupakan bagian dari *Uljin Perfecture*. Ulleungdo dan Dokdo adalah wilayah Ussanguk ( pulau yang tidak berpenghuni ) yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 ( 512 SM ) yang menunjukan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal sejak masa dinasti Silla[[11]](#footnote-12). Selain itu, terdapat fakta bahwa Dokdo merupakan bagian dari Korea yang tidak hanya dketahui oleh Jepang namun juga diketahui oleh negara – negara barat, pada tahun 1737 seorang ahli geografi yang berasal dari Prancis yang menunjukan bahwa Dokdo berada dekat ke wilayah Korea.

Jepang telah membentuk kedaulatan Takeshima di pertengahan abad ke-17 menunjukkan fakta bahwa Jepang telah lama mengakui keberadan dari Takeshima. Hal ini dibuktikan melalui dokumen yang menunjukan pada awal abad ke-17 pemerintahan Jepang secara resmi memberikan rakyatnya perjalanan ke pulau Utsuryo dan menggunakan Takeshima sebagai pelabuhan navigasi untuk kapal dalam perjalanan mereka ke Utsuryo dan sebagai wilayah untuk memburu sumber daya laut seperti singa laut dan abalone[[12]](#footnote-13).

Setelah munculnya perang Rusia – Jepang pada tahun 1904, Korea Selatan dan Jepang membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa Korea menyerahkan sepenuhnya urusan diplomatik dan pemerintahannya kepada Jepang pada masa itu serta menyerahkan wilayahnya jika Jepang membutuhkan untuk kepentingan perang.[[13]](#footnote-14) Kepulauan Takeshima ( Dokdo ) digunakan Jepang sebagai pusat komunikasi dimana hal ini bertujuan untuk bisa mendeteksi serta mencegah serangan dari Rusia, perang Jepang – Rusia menghasilkan konsekuensi pada tahun 1905 yaitu Jepang berhak untuk mengambil alih wilayah yang awalnya merupakan bagian dari jajahan Rusia, hal ini menunjukan bahwa wilayah semenanjung Korea termasuk ke dalam wilayah yang menjadi bagian dari hasil perang tersebut sehingga Jepang pada tanggal 22 Februari 1905 menegaskan kembali kedaulatannya atas Takeshima ( Dokdo ). Pemerintah Korea Selatan menganggap perjanjian yang dilakukan antara Jepang dan Korea Selatan pada Agustus 1904 salah satu cara Jepang untuk mengagresi Korea Selatan dan menjadikan Takeshima ( Dokdo ) menjadi korban pertama melawan Korea Selatan[[14]](#footnote-15).

Pada tahun 1910 Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik luar negeri Korea Selatan yang pada saat itu berlansung selama kurang lebih 35 tahun. Selama kedudukan Jepang di Semenanjung Korea ada dua tahap penting yang dilakukan sebagai kebijakan penjajahan Jepang terhadap Korea, *Pertama,* masa awal tekanan Jepang terhadap Korea yang berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 dimana para pedagang Jepang yang di bantu oleh kelompok – kelompok bersenjata dengan bentuk kekerasan mengeksploitasi Korea. *Kedua,* Jepang secara perlahan mulai menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Korea dengan memasukkan struktur masyarakat Jepang kedalam struktur masyarakat Korea.

Pada tahun 1945 setelah Perang Dunia ke-II, Jepang menyerah terhadap sekutu membuat pemerintahan tinggi di Tokyo mulai mengembalikan wilayah kolonialnya yang di miliki oleh Jepang kepada pemilik asalnya. Pada tanggal 29 Januari 1946 pemerintah Jepang mengeluarkan edaran militer No. 677 SCAPIN dan mengembalikan Jejudo, Ulleungdo dan Dokdo ( Takeshima ) kepada Korea Selatan[[15]](#footnote-16). Pada saat Amerika membuat rancangan perdamaian San Francisco untuk sekutu, Amerika memasukkan undang – undang bahwa Dokdo merupakan wilayah Korea Selatan sejak rancangan pertama hingga rancangan ke-5. Jepang menyadari hal tersebut dan melobi konsulat Amerika untuk menjadikan Dokdo ( Takeshima ) menjadi pusat radar dan meteorolog untuk angkatan udara Amerika, atas desakan tersebut Amerika menandai Dokdo ( Takeshima ) bukan sebagai wilayah Korea Selatan tetapi wilayah Jepang pada rancangan yang ke-6 namun rancangan tersebut tidak disetujui oleh Inggris, New Zealand, dan Australia. Pada rancangan ke-7 sampai ke-9 Dokdo ( Takeshima ) tidak di sebutkan. pada September 1952 perjanjian San Francisco Pasal 2 menyatakan “ Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea termasuk pulau Quelpart , Port Hamilton, dan Daglet ( Jejudo, Geomundo, dan Ulleungdo )sehingga Jepang berhasil mempertahankan pengakuan sekutu bahwa Dokdo ( Takeshima ) adalah termasuk kedalam wilayah Jepang.

Klaim Jepang tersebut secara fakta tidak akurat karena Dokdo ( Takeshima ) digabungkan dengan Ulleungdo yang ketika dalam perjanjian disebutkan Ulleungdo yang berarti secara otomatis menyadari bahwa Dokdo ( Takeshima ) secara otomatis juga wilayah Korea Selatan. Kasus tersebut sama dengan Jejudo yang memiliki pulau yang digabungkan yaitu pulau Udo dan hanya mencantumkan Jejudo saja berarti pulaua secara otomatis juga menjadi wilayah Korea Selatan, sehingga ribuan pulau Korea Selatan yang tidak disebutkan spesifik dalam perjanjian perdamaian tidak berarti bahwa mereka menjadi milik Jepang karena kesalahpahaman. Pada tahun 1948 pasukan Angkatan Udara Amerika berlatih pengeboman di dekat area kepulauan Dokdo ( Takeshima ) dan setelah itu mulailah rumor tentang Dokdo yang telah ditunjuk sebagai pusat manuver Angkatan Udara Amerika oleh Komite Gabungan Jepang – Amerika Serikat selama masa perang Korea Selatan, maka pemerintah Jepang mengklaim hal ini menunjukan jelas bahwa pasukan PBB menganggap Dokdo ( Taekshima ) sebagai teritorial Jepang.

Korea Selatan merespon dengan mengumumkan oposisinya pada tindakan Jepang dan Angkatan Udara Amerika Serikat dengan mengirimkan surat kepada pemerintahan Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa Dokdo ( Takeshima ) tidak digunakan untuk tujuan yang telah beredar dalam rumor tersebut sehingga pada tahun 1954 Korea Selatan membangun sebuah mercusuar yang digunakan sebagai pusat pemantuan dan penjagaan militer oleh negara Korea Selatan. Saat perang Korea meletus pada tahun 1956 pasukan PBB dan Komandan Udara Amerika Serikat membuat Zona Pertahanan Serangan Udara Korea ( KADIZ ) untuk melindungi daerah teritori Korea Selatan dari serangan udara dan terus berlanjut hingga saat ini. Pihak Amerika Serikat memasukkan Dokdo ( Takeshima ) kedalam KADIZ dan melindungi bagian dari teritorial Korea Selatan termasuk hal tersebut juga menjadi salah satu fakta pendukung bahwa pasukan udara PBB membela Dokdo ( Takeshima ) sebagai bagian dari teritorial Korea Selatan.

Pada saat Perang Dingin berlangsung pada tahun 1960 normalisasi hubungan antara negara – negara yang mendukung ideologi barat menjadi semakin penting, akan tetapi masalah teritorial yang menyangkut negara Jepang dan Korea Selatan menjadi hambatan adanya normalisasi hubungan tersebut sehingga pada tahun 1965 perdana menteri Korea Selatan Chong Il Kwon dan perdana menteri Jepang Kono Ichiro sepakat bahwa perselisihan akan di tangguhkan di pecahkan namun tidak dengan menyelesaikannya[[16]](#footnote-17), sehingga dimasa depan kedua negara akan kembali mengeklaim wilayah pulau Takeshima ( Dokdo ) masuk kedalam wilayah Jepang maupun wilayah Korea Selatan. Pada tahun 1996 ketika Menteri Luar Negeri Jepang Ikeda Yukihiko menegaskan kembali klaim atas pulau Takeshima setelah Korea Selatan merencanakan untuk membangun sebuah dermaga di pulau Dokdo, dan membuat amarah masyarakat Korea Selatan muncul sehingga Jepang menunda untuk membangun dermaga di pulau Takeshima ( Dokdo ).

Masuk pada era abad ke-21 permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang pada awalnya mereda muncul kembali pada tahun 2005 dengan adanya penegasan kembali oleh pemerintah Jepang mengenai perayaan *Takeshima Day* yang jatuh pada tanggal 22 Februari. Pernyataan tersebut berisi sebagai berikut : “ *Takeshima day shall be instituted in order to promote a movement by the citizens of the prefecture, it’s cities, towns and villages united as one aimed at estabilishment of territorial rights on Takeshima at early date at enlightening the opinions of the nation with respect to the issue of Takeshima. The perfecture shall strive to implement measures and policies necessary to promote undertakings befitting the purposes and objectives of Takeshima Day [[17]](#footnote-18)“* ( *Takeshima Day* akan di tujukan untuk mempomosikan gerakan oleh masyarakat perfekture, kota, dan desa yang disatukan sebagai suatu kesatuan yang bertujuan untuk membangun hak teritorial di Takeshima pada awal tanggal dan pencerahan pendapat dari bangsa sehubungan dengan masalah Taekshima. Prefektur akan berusaha untuk menerapkan langkah - langkah dan kebijakan yang di perlukan untuk mempromosikan usaha untuk mencapai tujuan dari *Takeshima Day* ). Pemerintah Korea Selatan segera beraksi dengan kemarahan mengenai deklarasi yang di tunjukan oleh pemerintah Jepang demonstrasi dari masyarakat Korea Selatan juga ikut turun menolak adanya perayaan *Takeshima Day*, para demonstran menganggap bahwa pulau Takeshima adalah milik Korea Selatan dan pihak Jepang tidak berhak atas kepulauan tersebut.

Tiga tahun setelahnya tepatnya pada tahun 2008 Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan adanya brosur mengenai kepulauan Takeshima yang berjudul “ *10 Issues Of Takeshima* “ dalam brosur ini pemerintah Jepang menguraikan mengenai sengketa Takeshima ( Dokdo ), serta klaim Jepang terhadap pulau Takeshima. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan Lee Myung – Bak ke pulau Takeshima ( Dokdo ) pada bulan Agustus 2012 membuat pemerintah Jepang marah karena seharusnya pada 15 Agustus merupakan hari peringatan ke–67 penyerahan Jepang terhadap penjajahan Korea Selatan dan perenungan bagi korban – korban yang jatuh pada masa konflik namun presiden Korea Selatan Lee Myung – Bak memilih untuk mengunjungi pulau Takeshima ( Dokdo ) yang membuat pemerintahan Jepang marah[[18]](#footnote-19). Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017 kunjungan ke pulau Takeshima ( Dokdo ) yang dilakukan oleh gubernur provinsi Gyeongsangbuk-do Kim Kwang – Yong yang membuat Jepang geram dan melayangkan protes kepada Korea Selatan karena hal tersebut sama sekali tidak dapat diterima terkait posisi negara Jepang pada kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo )[[19]](#footnote-20) hal – hal tersebut yang membuat sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) kembali muncul dan menyebabkan perdebatan dan protes dari kedua negara.

Dalam perkembangannya kedua negara melakukan adanya propaganda yang di tujukan untuk masyarakat di kedua negara tersebut, bentuk dari propaganda itu sendiri dapat berupa adanya pamflet, buku pelajaran, musik, brosur, dan video mengenai pulau Takeshima ( Dokdo ) yang diterbitkan oleh pemerintahan Jepang dan Korea Selatan. Sebagai contoh adanya lagu yang berjudul “ *Dokdo is our land* “ yang di buat oleh penulis dan komposer lagu Park In Ho dan Jeong Gwang Tae pada tahun 1982 dalam lagu tersebut mengungkapkan mengenai pulau Dokdo lagu ini di bertujuan untuk memberitahu masyarakat luas termasuk masyarakat Korea Selatan bahwa pulau Dokdo adalah milik Korea Selatan. Selain itu kedua negara juga membuat sebuah pamflet atau brosur yang di terbitkan oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara yang dapat diakeses oleh masyarakat luas dengan berbagai bahasa dan masyarakat kedua negara sendiri, dalam pamflet atau brosur yang di terbitkan oleh pemerintah berisi mengenai posisi negara masing –masing terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dan sejarah yang menjelaskan mengenai pulau tersebut dari sudut pandang kedua negara.

Masyarakat Korea Selatan juga membuat adanya poster atau tulisan yang disebarkan atau di tempel di berbagai tempat umum contohnya pertokoan atau warung - warung yang ada di sepanjang jalan yang bertujuan agar masyarakat Korea Selatan tetap ingat bahwa Dokdo adalah milik Korea Selatan. Dalam dunia pendidikan pemerintah Jepang juga memasukkan adanya propaganda yang dimana pemerintah memasukkan kurikulum yang membahas mengenai hak kepemilikan kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dalam buku pegangan untuk pembelajaran. Salah satu contohnya pada tahun 2008 Jepang mengeluarkan adanya buku pegangan pedoman baru untuk studi sosial sekolah menengah yang memicu adanya pernyataan oleh Korea Selatan yang berisi bahwa “ Korea Selatan tidak dapat menerima keputusan Jepang untuk memasukkan dalam buku pegangan tentang pedoman baru untuk studi sosial sekolah menengah atas klaimnya terhadap Dokdo, pemerintah Korea Selatan memprotes pemerintah Jepang untuk segera melakukan tindakan korektif secepatnya[[20]](#footnote-21)“. Adanya video yang dibuat oleh *South Korea Broadcasting* yang berjudul “ Dokdo “ juga menjadi salah satu propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menyebarkan pesan untuk masyarakat luas mengenai kepemilikan Korea Selatan terhadap kepulauan Dokdo.

Penyelesaian mengenai permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sudah lama dilakukan baik secara diplomatik atau secara yudisial, penyelesaian secara diplomatik sudah dilakukan sejak tahun 2006, disaat pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang, wilayah yang rencananya akan diteliti oleh Jepang tersebut mencangkup dengan perairan sekitar kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dimana Jepang dan Korea Selatan mengklaim sebagai Zona Eksklusif Ekonominya. Hal ini memicu adanya ketegangan antara kedua negara sehingga Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk melakukan negosiasi demi menyelesaikan sengketa tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang yang pada saat itu menjadi negosiator menyatakan bahwa negosiasi antara Jepang dan Korea Selatan berlangsung sangat alot sehingga negosiasi tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) namun pada negosiasi ini Jepang sepakat untuk menunda riset ilmiah dan Korea Selatan menunda mendaftarkan fitur geografis bawah laut kepada Organisasi Hidrologi Internasional. Kedua negara juga sepakat untuk melakuakn kegiatan riset ilmiah bersama dan menghasilkan adanya penemuan gas hidrat di sekitarran pulau Takeshima ( Dokdo ).

Selain adanya upaya penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) melalui negosiasi ( diplomatik ) pihak Jepang telah mengajukan permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) ke dalam Mahkamah Internasional dimana Mahkamah Internasional adalah salah satu badan hukum yang sering menyelesaikan permasalahan sengketa internasional yang melibatkan antara negara – negara anggota PBB sebagai contoh penyelesaian sengketa pulau Sipadan Linggitan antara Indonesia dan Malaysia yang akhirnya mendapatkan keputusan dari hakim bahwa Sipadan Linggitan merupakan wilayah Malaysia. Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaiakan permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu : *Pertama,* pada bulan Maret 1962. *Kedua,* pada bulan September 1964. *Ketiga,* pada bulan Agustus 2012[[21]](#footnote-22). Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) ditolak oleh Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa proposal pemerintah Jepang tidak lain adalah upaya palsu lainnya yang disamarkan dalam bentuk proses peradilan, Korea Selatan memiliki hak atas Dokdo dan tidak melihat adanya alasan mengapa Korea Selatan harus mencari fakta – fakta serta mencari verifikasi hak – hak tersebut di hadapan pengadilan internasional[[22]](#footnote-23).

1. **Perspektif Realis Dalam Sengketa Kepulauan Takeshima Antara Jepang dan Korea Selatan**

Perspektif merupakan suatu pendekatan untuk melihat dan mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang tertentu, dalam teori hubungan internasional terdapat beberapa perspektif yang berbeda dalam pengkajiannya, salah satunya yaitu perspektif dari kaum realisme. Realisme adalah salah satu perspektif yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam hubungan internasional, perspektif realisme dapat menjelaskan mengenai terjadinya perang antara negara yang sering terjadi pada sistem internasional. Pada dasarnya perspektif realisme bersifat *competitive* dan *conflictual* dimana realisme memandang bahwa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan dan menyelesaikan persoalan dengan konflik atau peperangan, dalam perspektif realisme percaya pada negara berada dalam sistem anarki yaitu dimana tidak ada kekuasaan diatas negara, negara juga menjadi aktor utama dalam perspektif realis sedangkan aktor non-negara tidak diakui pernannya.

Seperti yang kita ketahui sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sudah lama terjadi, perebutan status kedaulatan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ) menjadi salah satu tujuan utama kedua negara, aksi klaim yang di ajukan oleh kedua negara membuat proses penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) berjalan dengan alot dan tegang sehingga dapat memicu hal – hal yang mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara ini. Aksi saling klaim yang dilakukan baik oleh negara Jepang maupun negara Korea Selatan membuat sekecil apapun aksi klaim yang dilakukan oleh kedua negara mengenai pulau Takeshima ( Dokdo ) ini dapat memicu adanya kemarahan dari berbagai pihak baik dari pemerintah kedua negara maupun masyarakat kedua negara.

Dalam perspektif realisme dimana dalam sifatnya yang *competitive* dan *conflictual*  sebuah negara akan melakukan berbagai cara untuk mendapat kepentingan nasionalnya meskipun negara tersebut harus mendapatkannya dengan cara berkonflik, hal ini apabila dilihat dari permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) dapat dilihat bahwa Jepang dan Korea Selatan melakukan berbagai cara untuk terus mengupayakan mempertahankan kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sebagai salah satu kedaulatan negaranya. Berbagai cara dilakukan kedua negara untuk mempertahankan hak kepemilikan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ), bentuk – bentuk bukti dari dimulainya dokumen sejarah, geografis, perjanjian, di kemukaan oleh kedua negara sebagai bentuk klaim kedua negara terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo ). Konflik yang dapat muncul apabila kedua negara masih tetap mempertahankan klaimnya terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo ) adalah dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang kemungkinan sangat dapat terjadi apabila kita melihat dengan sejarah kedua negara dimana pada tahun 1910 – 1945 Jepang menjajah Korea pada masa raja ke-26 dinasti Joseon, pada masa penjajahan yang dilakukan oleh negara Jepang banyak melakukan tindakan – tindakan yang berat, seperti hasil bumi Korea di rampas dan diangkut ke Jepang, eksploitasi sumber daya Korea secara besar – besaran yang dilakukan oleh Jepang, dan memberlakukan kebijakan asimilasi dimana Jepang melarang adanya pendidikan bahasa Korea di sekolah – sekolah, banyak wanita – wanita Korea yang diperkosa dan disiksa, penjajahan ini membuat rakyat Korea marah dan membangkitkan jiwa patriotismenya sehingga pada tanggal 1 Maret 1919 jutaan demonstran yang merupakan rakyat pribumi menuntut kemerdekaan bangsa Korea dari Jepang akibat dari demonstran ini banyak rakyat yang dihabisi dengan cara yang kejam oleh Jepang dan mengakibatkan kurang lebih 7000 rakyat Korea terbunuh. Hingga sekarang hal tersebut masih menjadi dasar rakyat maupun pemerintah Korea Selatan yang tidak ingin kedaulatannya di ganggu kembali oleh Jepang, sehingga apabila Jepang masih tetap mengklaim kedaulatan pulau Takeshima maka Korea Selatan kemungkinan akan berani untuk mengambil kebijakan untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara Jepang. Sedangkan negara Jepang dalam mempertahankan kedaulatannya atas kepulauan Takesima ( Dokdo ) merupakan suatu kewajiban untuk menjaga warisan dan legalitas sejarah yang telah ada sejak tahun 1905 dimana Jepang telah menyatakan bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) merupakan wilayah dari negara Jepang sehingga Jepang tidak ingin kedaulatan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang dimiliki oleh Jepang direbut oleh Korea Selatan.

Dengan adanya sentimen nasionalis, identitas, dan warisan sejarah dari kedua negara permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan akan menyulitkan penyelesaian permasalahan sengketa, apabila Korea Selatan melakukan konsesi ( pemberian ijin atau hak ) dengan Jepang terhadap kepulauan Takeshima di takutkan akan menimbulkan berbagai protes dari masyarakat Korea Selatan dan membuat ancaman keamanan didalam negeri, begitu juga dengan Jepang apabila melakukan hal yang sama dapat memicu adanya protes dari masyarakat Jepang dan membuat ancaman kemanan dalam negeri. Dalam perspektif realis isu kemanan merupakan isu paling utama dan dominan sehigga suatu negara dalam mengambil kebijakan atau keputusan akan memperhitungkan *cost and benefit* demi kepentingan keamanan nasional.

Sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang sampai saat ini belum terselesaikan di khawatirkan akan menimbulkan adanya konflik yang berkepanjangan bagi kedua negara bukan tidak mungkin bagi Korea Selatan maupun Jepang dapat memutuskan hubungan diplomatik kedua negara yang disebabkan oleh permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang tidak ujung menemui titik penyelesaian, dalam Pasal 2 ayat ( 3 ) Piagam PBB menyatakan “ *All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered*  [[23]](#footnote-24)“ ( semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai sehinga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional ) dalam pernyataan pasal 2 ayat ( 3 ) Piagam PBB tersebut semua negara anggota diwajibkan untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, namun untuk permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) tidak dapat diselesaikan dengan cara damai karena dalam proses penyelesaiannya dengan cara damai yaitu melalui diplomatik Jepang dan Korea Selatan tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Takeshima.

Penyelesaian sengketa melalui hukum yaitu melalui mahkamah internasional, dimana mahkamah internasional sering melakukan proses penyelesaian sengketa internasional tidak dapat menjadi solusi sebagai penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dikarenakan pihak Korea Selatan menolak tiga kali perjanjian yang diajukan oleh Jepang untuk membawa permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) ke mahkamah internasional yaitu *Pertama,* pada bulan Maret 1962. *Kedua,* pada bulan September 1964. *Ketiga,* pada bulan Agustus 2012. Sedangkan dalam proses beracara dalam mahkamah internasional kedua negara yang bersengketa atau berkonflik harus menandatangani perjanjian penyerahan permasalahan sengketa ke mahkamah internasional apabila salah satu pihak menolak maka proses beracara di dalam mahkamah internasional tidak dapat dilakukan. Sehingga cara penyelesaian hukum tidak dapat menyelesaiakan permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) apabila salah satu negara yang bersengketa tidak menyetujui perjanjian penyerahan sengketa ke mahkamah internasional.

Ketika suatu konflik atau sengketa tidak menemui penyelesaian maka jalan yang ditempuh suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang melibatkan negara tersebut adalah dengan melalui perang. Seperti yang dilakukan oleh negara Argentina dan Inggris yang menyelesaikan sengketa pulau Falkland ( Inggris ) atau Malvinas ( Argentina ) dengan melalui perang yang di laksanakan pada bulan Maret tahun 1982 dimana Argentina lebih dahulu menyerang pulau Falkland ( Malvinas ) dengan mengirim 30 kapal dan tindakan ini tidak diterima oleh Inggris sehingga kerajaan Inggris mengirimkan tentara kerajaan ke pulau Falkland ( Malvinas ) peperangan ini dimenangkan oleh tentara Inggris dimana mereka didukung dengan adanya senjata – senjata tempur modern sehingga Argentina menyerah pada bulan Juni 1982 dan pulau Falkland ( Malvinas ) di dapatkan oleh Inggris.

Penyelesaian Sengketa Kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dapat diselesaikan dengan cara perang dan dapat ditentukan dengan adanya hasil kemenangan perang yang dapat di menangkan oleh Jepang maupun Korea Selatan, seperti yang kita ketahui kedua negara termasuk sebagai negara yang maju, dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat, pertumbuhan ekonomi yang maju, kekuatan militer yang maju, dan pasukan militer yang dimilki kedua negara juga banyak terlebih Korea Selatan terdapat adanya program wajib militer bagi kaum laki – laki hal tersebut menjadi salah satu kelebihan Korea Selatan menjadi nilai lebih dari masing – masing negara.

Apabila kedua negara lebih memilih jalur penyelesaian sengketa melalui perang maka kedua negara dapat menyelesaikan permasalahan sengketa ini dengan mudah, namun dengan adanya penyelesaian sengketa melalui perang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Perang dapat berjalan dalam kurun waktu yang lama tidak hanya sebulan namun dapat memerlukan waktu berbulan – bulan hingga bertahun – tahun untuk menyelesaikan peperangan, dalam jangka waktu yang lama tersebut kedua negara harus siap dengan semua proses pada masa perang, kedua negara harus pintar dalam melakukan strategi perang untuk mendapatkan hak kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo ). Kekuatan militer yang dimiliki oleh kedua negara menjadi salah satu faktor pendukung untuk melihat secara kasar negara mana yang dapat memenangkan perang untuk mendapatkan hak kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo ).

Kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang kuat dan bukan tidak mungkin kedua negara akan meminta bantuan Amerika Serikat untuk membatu kedua negara dalam menyelesaikan perang apabila benar Jepang dan Korea Selatan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa melalui jalur perang.

Setelah perang selesai timbul masalah baru akibat adanya perang antara kedua negara, kedua negara harus siap untuk merasakan resiko atau akibat pasca perang yang dapat merugikan negara dalam bidang ekonomi, kemanusian, dan lain lain, sebagai contoh dalam bidang ekonomi, pada masa perang suatu negara dapat mengeluarkan banyak dana untuk membiayai seluruh proses pada masa perang, karena roda ekonomi otomatis akan berhenti apabila ada suatu negara yang terlibat perang sehingga negara yang terlibat perang harus bekerja lebih dalam mengatur ekonomi negara dalam masa perang. Sehingga pasca perang negara tersebut akan mengalami permasalahan atau krisis ekonomi yang merugikan bagi seluruh masyarakat dan dapat menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Selain dalam permasalahan ekonomi dalam kemanusian juga dapat menimbulkan banyak korban jiwa yang jatuh dalam masa perang dan hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kesedihan mendalam bagi masyarakat kedua negara.

1. Dokdo – Takeshima, “ *Historical Facts About Korea’s Dokdo Island* “ di akses dari <http://www.dokdo-takeshima.com>, diakses pada tanggal 16 April 2018 Pukul 14.05 WIB [↑](#footnote-ref-2)
2. SSPD ( *Student Society for Protection Dokdo* ), “ *Dokdo Profile* “ di akses dari <http://www.infokorea.org/kor/dokdo_profile>, diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 14.16 [↑](#footnote-ref-3)
3. Paul O’shea, “ *Playing the Sovereignty Game : Understanding Japan’s Territorial Disputes “* ( Disertasi, *School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012* ) hal 114 – 155 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ministry Of Foreign Affairs South Korea*, “ *Dokdo, Beautiful Island of Korea* “ hal 6 [↑](#footnote-ref-5)
5. LimTaeWi, “ *Korean – Japan Relations : The Dokdo Issue From The Korean Perspective “* hal 2 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid* hal 5 [↑](#footnote-ref-7)
7. Paul O’shea, “ *Playing the Sovereignty Game : Understanding Japan’s Territorial Disputes “* ( Disertasi, *School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012* ) hal 108-109 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ministry of Foreign Affairs Japan*, “ *Takeshima : Definitive Clarifications as to why Takeshima is Japan’s Territory, 10 Poins To Understand the Takeshima Disputes”* hal 3 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yong-ho Ch’oe, “ *Japan’s 1905 Incorporation of Dokdo ( Takeshima ) : A Historical Perspective” hal 17 -18* [↑](#footnote-ref-10)
10. Gita Utami, “ Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan “ hal 7 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ministry Of Foreign Affairs South Korea, “ *Dokdo, Beautiful Island of Korea* “ hal 6 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ministry Of Foreign Affairs Japan, “ *Takeshima : Definitive Clarifications as to why Takeshima is Japan’s Territory, 10 Poins To Understand the Takeshima Disputes* “ hal 4 [↑](#footnote-ref-13)
13. Irfan Dwi, “ Pengaruh Sengketa Kepulauan Takeshima Terhadap Fluktuasi Hubungan Antara Jepang dan Korea Selatan Pada Era Junichiro Koizumi “ hal 2 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ministry Of Foreign Affairs South Korea, “ Dokdo, Beautiful island of Korea* “ hal 10 [↑](#footnote-ref-15)
15. Dokdo Takeshima “ Post World War II “ di akses dari [www.dokdo-takeshima.com/post-world-war-ii-dokdo-.html](http://www.dokdo-takeshima.com/post-world-war-ii-dokdo-.html) diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 18.57 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
16. Paul O’shea, “ *Playing the Sovereignty Game : Understanding Japan’s Territorial Disputes “* ( Disertasi, *School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012* ) hal 109 – 110. [↑](#footnote-ref-17)
17. Dokdo takeshima, “ *Shimane Declares Takeshima Day as February 22 – Japan Adds insult Injury “* <http://www.dokdo-takeshima.com/happy-takeshima-day.html> diakes pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22.07 WIB [↑](#footnote-ref-18)
18. Time, “ *War Legacy Plagues Japan and It’s Neighbors “*di akses dari <http://nation.time.com/2012/08/16/wars-legacy-pleagyes-japan-and-its-neighbors/nd> diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 1.57 WIB [↑](#footnote-ref-19)
19. OkeZone News, “ Jepang Geram Pejabat Korea Selatan Kunjungi Pulau Sengketa “ di akses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa> , di akses pada tanggal 20 April 2018 Pukul 2.20 WIB [↑](#footnote-ref-20)
20. Ministry Of Foreign Affairs South Korea, “ *goverment announce list “* dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo\_goverment\_announce\_list.jsp diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 23.20 WIB [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ministry of Foregein Affairs of Japan, “ Diplomatic Blue Book Japan 2016 “* hal 36 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ministry of Foregein Affairs of Korea, “ Dokdo “* <http://dokdo.mofa.go.id/eng/dokdo/faq14.jsp> diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 0.09 WIB [↑](#footnote-ref-23)
23. Huala, Adolf, “ Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional “ hal 12 [↑](#footnote-ref-24)